



BUKU PROFIL GENDER KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SIJUNJUNG**

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kenikmatan kelancaran serta rahmatnya yang tidak ternilai sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Buku Data Gender dan Anak tahun 2019 dengan baik. Dengan memperhatikan dan mempedomani Peraturan Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.

Data Gender dan Anak menjadi elemen penting bagi terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) yang dapat membantu para pengambil kebijakan untuk memberikan gambaran secara spesifik mengenai peran, situasi dan kondisi perempuan dan laki-laki di Kabupaten Sijunjung, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penyelenggaraan PUG, PP, PUHA.

Penggunaan Data Gender dan Anak sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program / kegiatan yang dilakukan oleh OPD sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender.

Tersusunnya buku ini merupakan wujud kerjasama yang baik Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan OPD serta Instansi Vertikal dan Lembaga terkait di Kabupaten Sijunjung, dengan segala hormat dan segala kerendahan hati disampaikan rasa terima kasih yang dalam atas kerjasamanya serta kepada semua pihak yang turut serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan buku ini.

Akhirnya kami sebagai tim penyusun menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna dan dengan segala keterbatasan yang ada, maka kerjasama yang sinergis dan berkesinambungan sangat diperlukan demi sempurnanya penyusunan buku ini dan semoga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kabupaten Sijunjung.

Muaro Sijunjung, 23 September 2019

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kab. Sijunjung



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Publikasi Data Terpilah.....	2
C. Sumber Data	3
D. Sistematika	3
 BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN MASYARAKAT KABUPATEN SIJUNJUNG	
A. Kondisi Geografis	5
B. Sosial Budaya	7
C. Sosial Budaya	13
D. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	17
E. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	18
F. Ketimpangan Gender Dalam Pembangunan	18
 BAB III STRUKTUR KEPENDUDUKAN	
A. Penduduk menurut Jenis Kelamin	22
B. Penduduk menurut Jenis Umur dan Jenis Kelamin.....	23
C. Penduduk menurut Jenis Usia Produktif	24
 BAB IV KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	
A. Pengarusutamaan Gender	25
B. Dasar Hukum Dan Arah Kebijakan Pemberdayaan	27
 BAB V BIDANG PENDIDIKAN	
A. Angka Partisipasi Kasar.....	30
B. Angka Partisipasi Murni.....	30
C. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur.....	32
D. Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan	33
E. Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan Tinggi yang ditamatkan	33
F. Rata-rata lama Sekolah.....	34
G. Kelulusan Paket A,B DAN C.....	34
 BAB VI BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	
A. Angka Kematian Ibu Melahirkan.....	36
B. Penyebab Kematian Ibu Melahirkan	37

C. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)	38
D. Penderita HIV/AIDS.....	38
E. Keluarga Berencana.....	39
BAB VII BIDANG KETENAGAKERJAAN	
A. Tenaga Kerja Migran Antar Kerja Antar Negara	42
B. Pekerja di Sektor Formal.....	42
C. Pekerja di Sektor Informal	43
BAB VIII BIDANG POLITIK	
A. Anggota DPRD.....	44
BAB IX BIDANG HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA	
A. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan.....	46
B. Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan menurut Jenis Kelamin.....	47
C. Pengguna NAPZA	48
BAB X BIDANG PARTISI DI LEMBAGA EKSEKUTIF	
A. PNS menurut Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin	49
B. Camat.....	50
C. Kepala Desa/Lurah/Wali Nagari.....	50
D. Tim Baperjakat.....	51
BAB XI BIDANG EKONOMI	
A. Usaha Mikro Dan Kecil	52
B. Keanggotaan Koperasi.....	53
BAB XII BIDANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN	
A. Polisi	54
B. Jaksa	55
C. Hakim.....	55
BAB XIII PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Jumlah Kecamatan Nagari dan Jorong di Kabupaten Sijunjung	7
2.2 Nama Nagari dan Jorong di Kabupaten Sijunjung	7
3.1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan	22
3.2 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sijunjung Tahun 2018.....	23
3.3 Jumlah Penduduk Berumur 15 tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sijunjung Tahun 2018	24
5.1 Angka Paertisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2018...	30
5.2 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2018...	31
5.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur Tahun 2018.....	32
5.4 Angka Putus Sekolah menurut Jenjang Pendidikan	33
5.5 Penduduk menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	33
5.6 Rata-rata Lama Sekolah.....	34
5.7 Sertifikasi Guru.....	34
5.8 Kelulusan Paket A, B dan C	34
6.1 Jumlah Angka Kematian Ibu Melahirkan menurut Kecamatan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2018.....	37
6.2 Jumlah Penyebab Kematian Ibu Melahirkan menurut Kecamatan di Kabuoaten Sijunjung Tahun 2018	37
6.3 Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Posyandu dan Puskesmas.....	38
6.4 Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Sijunjung	39
6.5 Jumlah Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2018.....	40
7.1 Tenaga Kerja Migran Antar Kerja Antar Negara.....	42
7.2 Pekerja di Sektor Formal Kabupaten Sijunjung.....	42
7.3 Pekerja di Sektor Informal Kabupaten Sijunjung.....	43

8.1	Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung.....	45
9.1	Penghuni Lembaga Pemasyarakatan menurut Jenis LAPAS dan Jenjang Pendidikan Tahun 2018.....	47
9.2	Jumlah Penghuni LAPAS menurut Jenis Kelamin	47
9.3	Pengguna NAPZA	48
10.1	PNS menurut Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin.....	49
10.2	PNS menurut Pendidikan	50
10.3	Camat Kabuten Sijunjung.....	50
10.4	Kepala Desa/Lurah/Wali Nagari Kabupaten Sijunjung.....	50
10.5	Tim Baperjakat Kabupaten Sijunjung.....	51
11.1	Usaha Mikro dan Kecil	52
11.2	Keanggotaan Koperasi.....	53
12.1	Polisi Kabupaten Sijunjung.....	54
12.2	Jaksa Kabupaten Sijunjung.....	54
13.3	Hakim Kabupaten Sijunjung	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gender diartikan sebagai pedoman fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada prakteknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan di lingkungan rumah tangga, pekerjaan masyarakat, kultur, maupun Negara. Oleh sebab itu untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara.

Kesetaraan gender (gender eguety) lebih memaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi disegala bidang. Jadi kesetaraan gender bukan hanya dimaknai dari segi perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan saja. Sementara itu, keadilan gender merupakan proses dan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak pembakuan peran, beban ganda, subordinitasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun kepada laki-laki.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan, memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumberdaya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumberdaya tersebut. Sedangkan memiliki kontrol berarti wewenang penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional bahwa setiap Kementerian / Lembaga dan pemerintah daerah harus melaksanakan Pengarusutamaan Gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan Nasional yang perspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta wewenang masing-masing.

Penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 berjumlah 233.810 jiwa yang terdiri dari 117.178 jiwa laki-laki dan 116.632 jiwa perempuan dengan rasio jenis kelamin 103,76. Penduduk Kabupaten Sijunjung per Kecamatan terdiri dari Kecamatan Kamang Baru 50.438 jiwa, Kecamatan Tanjung Gadang 25.242 jiwa, Kecamatan Sijunjung 46.585 jiwa, Kecamatan Lubuk Tarok 15.338 jiwa, Kecamatan IV Nagari 17.319 jiwa, Kecamatan Kupitan 14.161 jiwa, Kecamatan Koto VII 38.565 jiwa dan Kecamatan Sumpur Kudus 26.162 jiwa. Berdasarkan hal di atas penduduk yang paling banyak yaitu di Kecamatan Kamang Baru.

Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak. Mengingat pentingnya data ini dalam proses perencanaan, maka pemerintah didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 13 ayat 1 mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang

Data dan informasi yang dimaksud akan dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistimatis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

Terkait dengan hasil tersebut, maka disusunlah “Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Sijunjung Tahun 2019” sebagai gambaran keadaan perempuan dan anak di Kabupaten Sijunjung diberbagai bidang.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan buku profil gender anak adalah untuk menjanjikan data yang dapat menginformasikan lebih jelas kondisi perempuan dibandingkan laki-laki terkait dengan masalah kependudukan, karakteristik rumah tangga, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, ketenagakerjaan, sektor publik, kekerasan terhadap perempuan, sosial ekonomi lainnya, dan kesulitan fungsional penyandang disabilitas, serta memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak di Kabupaten Sijunjung yang diamati dari aspek lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak baik terhadap masalah sosial, hukum, kekerasan, anak bekerja dan anak cacat.

C. Sumber Data

Data yang disajikan dalam buku profil gender dan anak Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu dari OPD, Statistik (BPS) Instansi dan lembaga terkait di Kabupaten Sijunjung

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian buku profil gender dan kesejahteraan perlindungan anak Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan Publikasi Data Terpilah
 - C. Sumber Data
 - D. Sistematika
- BAB II : Gambaran Umum Wilayah dan Masyarakat Kabupaten Sijunjung
 - A. Kondisi Geografis
 - B. Sosial Budaya
 - C. Indeks Pembangunan Gender (IPM)
 - D. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 - E. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
 - F. Ketimpangan Gender Dalam Pembangunan
- BAB III : Status Penduduk Menurut
 - A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin
 - B. Penduduk Menurut Jenis Umur dan Jenis Kelamin
 - C. Penduduk Menurut Jenis Produktif
- BAB IV : Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
 - A. Pengarusutamaan Gender
 - B. Dasar Hukum dan Arah Kebijakan Pemberdayaan
- BAB V : Bidang Pendidikan
 - A. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan
 - B. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan
 - C. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kependudukan
 - D. Penduduk menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan
 - E. Rata-rata lama sekolah
 - F. Sertifikasi guru
 - G. Kelulusan paket A, B, dan C
- BAB VI : Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB)
 - A. Angka kematian ibu melahirkan
 - B. Penyebab kematian ibu melahirkan
 - C. Kunjungan ibu hamil (K.1 / K.4) ke Posyandu dan Puskesmas

- D. Penderita HIV / AIDS
- E. Keluarga Berencana
- BAB VII : Bidang Ketenagakerjaan
 - A. Tenaga Kerja Migran Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
 - B. Pekerja disektor formal
 - C. Pekerja disektor informal
- BAB VIII : Bidang Politik
 - A. Anggota DPDR
- BAB IX : Bidang Hukum dan Sosial Budaya
 - A. Penghuni Lembaga Perasyarakatan menurut jenis kelamin dan jenjang pendidikan
 - B. Jumlah penghuni Lembaga perasyarakatan menurut jenis kwlamin
 - C. Pengguna Napza
 - D. Pengusaha Indistri Mikro dan kecil
- BAB X : Bidang Partisipasi dilembaga Eksekutif
 - A. PNS menurut jabatan, golongan dan jenis kelamin
 - B. PNS menurut pendidikan
 - C. Camat
 - D. Kepala Desa / Lurah / Wali Nagari
 - E. Tim Baperjakat
- BAB XI : Bidang Ekonomi
 - A. Usaha Mikro dan Kecil
 - B. Keanggotaan Koperasi
- BAB XII : Bidang Pengambilan Keputusan
 - A. Polisi
 - B. Jaksa
 - C. Hakim
- BAB XIII : Penutup
 - A. Kesimpulan
 - B. Saran

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN MASYARAKAT KABUPATEN SIJUNJUNG

A. Kondisi Geografis

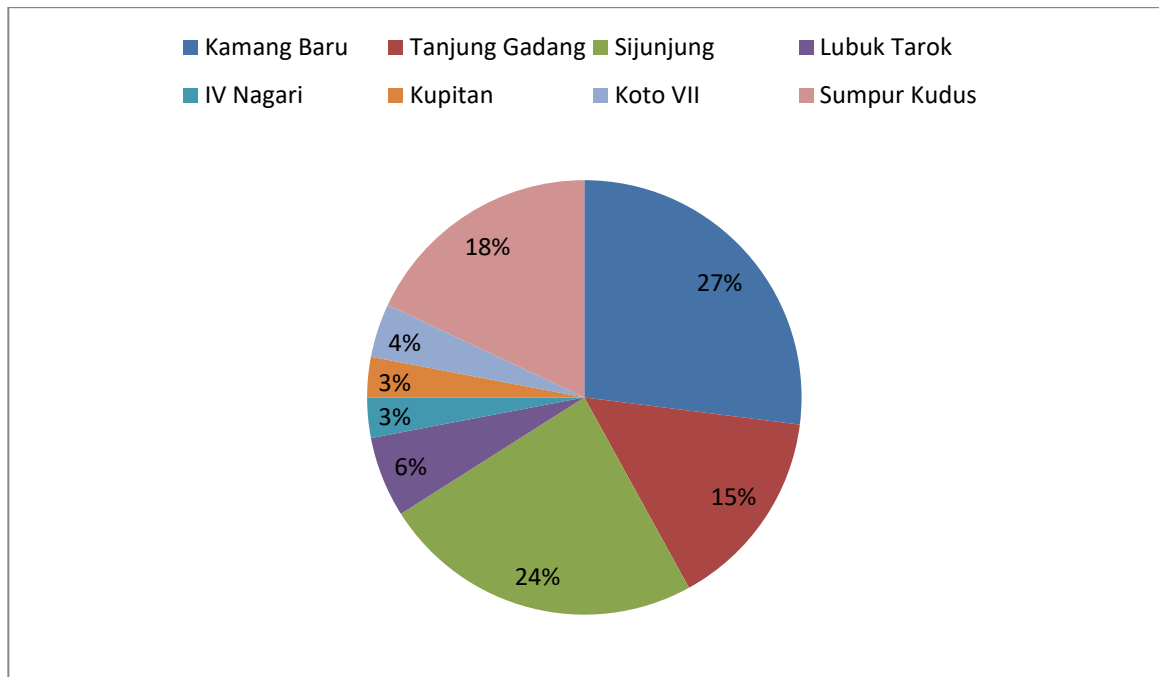
Kabupaten Sijunjung adalah salah satu kabupaten di sebelah Timur Provinsi Sumatera Barat, di sebelah barat Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sebagian besar penduduknya bersuku Minangkabau dengan falsafah adat, pola pikir, tatanan budaya, serta norma yang khas.

Sebelum terjadi pemekaran dengan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung merupakan kabupaten terluas ketiga di Provinsi Sumatera Barat. Saat ini Kabupaten Sijunjung memiliki luas wilayah 3.134,21 Km² atau sekitar 7,41 persen dari luas Sumatera Barat. Kabupaten Sijunjung terbentang pada posisi geografis 0o 18' 43" LS – 1o 41' 46" LS & 101o 30' 52" BT – 100o 37' 40" BT.

Di sebelah Utara, Kabupaten Sijunjung berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten 50 Kota, dan Kampar Riau, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singigi, Propinsi Riau, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto. Kabupaten Sijunjung terdiri dari 8 Kecamatan dan memiliki sekitar 8 sungai besar dan kecil.

Secara administratif, Kabupaten Sijunjung terdiri dari 8 kecamatan, 61 Nagari dan 1 Desa. Kecamatan Kamang Baru merupakan kecamatan paling luas yakni 837,80 Km², diikuti oleh Kecamatan Sijunjung dengan Luas 748,00 Km², Kecamatan Sumpur Kudus dengan luas 575,40 Km², Kecamatan Tanjung Gadang dengan luas 459.79 Km², Kecamatan Lubuk Tarok dengan luas 187,60, Kecamatan Koto VII dengan luas 143,90 Km², Kecamatan IV Nagari dengan luas 96,30 Km² serta Kecamatan Kupitan merupakan kecamatan dengan luas paling kecil, yakni 82,01 Km². berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten 50 Kota, dan Kampar Riau, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singigi, Propinsi Riau, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto jika di gambarkan seperti berikut.

Gambar 1. Persentase Luas Wilayah di Kabupaten Sijunjung



Sumber: Kabupaten Sijunjung Dalam Angka 2019

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat dengan ibukota Muaro Sijunjung. Secara Astronomis Kabupaten Sijunjung terletak antara 60' 08' Lintang Utara, 110 15' Selatan dan 940 45 – 1410' Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.134,21 Km² atau sekitar 7,41 persendari luas Propinsi Sumatera Barat. Jarak dari Kabupaten Sijunjung ke kota Padang (ibu kota propinsi) adalah 115 Km, dapat ditempuh melalui jalan darat dalam waktu sekitar 3 jam dengan kendaraan roda empat.

Secara administratif, Kabupaten Sijunjung terdiri dari 8 Kecamatan, 62 Nagari. Kecamatan Kamang Baru dengan luas wilayah 837.80 Km², Kecamatan Tanjung Gadang luas wilayah 459.79 Km², Kecamatan Sijunjung luas wilayah 748.00 Km², Kecamatan Lubuk Tarok luas wilayah 187.60 Km², Kecamatan IV Nagari luas wilayah 96.30 Km², Kecamatan Kupitan luas wilayah 82.01 Km², Kecamatan Koto VII luas wilayah 143.90 Km², dan Kecamatan Sumpur Kudus luas wilayah 575.40 Km². Luas wilayah Kabupaten Sijunjung jika di gambarkan seperti berikut.

B. Sosial Budaya

Penduduk Kabupaten Sijunjung terdiri dari multi etnis, yaitu Suku Minang, Suku Jawa, Suku Batak, dll. Secara administratif, Kabupaten Sijunjung memiliki 8 kecamatan, terdiri dari 61 Nagari dan 1 Desa. Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Kecamatan, Nagari dan Jorong di Kabupaten Sijunjung

No	Kecamatan	Nagari	Jorong
1	Kamang Baru	11	61
2	Tanjung Gadang	9	41
3	Sijunjung	9	56
4	Lubuk Tarok	6	24
5	IV Nagari	5	17
6	Kupitan	3 + 1 Desa	9 + 5 Dusun
7	Koto VII	7	36
8	Sumpur Kudus	11	35
Jumlah		61 + 1 Desa	299 + 5 Dusun

Sumber: Kabupaten Sijunjung Dalam Angka 2018

Tabel 2.2 Nagari dan Jorong di Kabupaten Sijunjung

No	Nagari	Jorong
1	Sungai Lansek	1. Cilacap 2. Talang 3. Koto 4. Sikayan 5. Sungai Ampang 6. Pasar 7. Batang Tonam
2	Muaro Takung	1. Dusun Tinggi 2. Kiliran Jao 3. Koto Lamo 4. Koto Rona 5. Sungai Sariek 6. Batang Talang 7. Batang Tiau
3	Kunungan Parit Rantang	1. Kunangan 2. Parik Rantang 3. Sungai Tambang I 4. Sungai Tambang II 5. Sungai Tambang III 6. Sungai Tambang IV 7. Mekar Jaya 8. Suka Maju 9. Suko Rejo

4	Kamang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batang Kariang 2. Galogah 3. Kamang 4. Kamang Abadi 5. Kamang Bakti 6. Kamang Makmur 7. Kamang Sejahtera 8. Kurnia Kamang 9. Simpang Kamang 10. Kamang Sentosa 11. Kamang Madani
5	Aie Amo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guguk Tinggi 2. Koto Baru 3. Banjar Tengah 4. Lubuk Kapiék 5. Koto Ranah 6. Koto Tuo
6	Sungai Batuang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koto 2. Pasar 3. Banjar Pematang
7	Siaur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koto Tengah 2. Lembah Gunung 3. Ranah Pinago
8	Lubuk Tarantang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dusun Tinggi II 2. Koto Baru 3. Lubuk Tarantang
9	Maloro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koto Ranah 2. Pasar 3. Sungai Alai 4. Sungai Gemuruh 5. Tanjung Balik
10	Tanjuang Kaliang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mudik Imuk 2. Parik Rantang 3. Pincuran
11	Padang Tarok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Binuang Aie Putieh 2. Koto Tengah 3. Muaro Buan 4. Pintu Batu
12	Langki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koto Langki 2. Liambang 3. Muaro Kaluai 4. Muaro Linggo
13	Sibakur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bancah 2. Koto 3. Lubuk Tolang
14	Pulasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambacang 2. Batang Kati 3. Koto Pulasan 4. Padang Laweh 5. Pasar Pulasan 6. Sawah Gadang 7. Sungai Kandi
15	Tanjung Lolo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukik Sabalah 2. Koto 3. Pasar Lamo

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Batang Dikek 5. Pasar Baru 6. Tanjung Medan
16	Tanjung Gadang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guguk Naneh 2. Kayu Gadih 3. Koto Baru 4. Koto Ranah 5. Mudik Malih 6. Pandam 7. Pasar Tajung Gadang 8. Sungai Napar 9. Timbulun Patah
17	Taratak Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koto 2. Ranah Palam 3. Koto Ranah
18	Timbulun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Balai-balai 2. Koto Timbulun 3. Sibisir 4. Tandikek
19	Taratak Baru Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lubuk Cupak 2. Pisang Kolek
20	Sinyamu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koto Sinyamu 2. Polak Sinyamu 3. Kumbayak
21	Muaro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batang Solasah 2. Ilie Guguk Dadok 3. Muaro Gambok 4. Ilie Pasa Jumak 5. Pematang Ajuang 6. Pamatang Sari Bulan 7. Pulau Barambai 8. Subarang Ombak 9. Subarang Sukam 10. Tengah
22	Kandang Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ranah Tanjung Bungo 2. Samiak 3. Sungai Abu
23	Pematang Panjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kalumpang 2. Koman Kocik 3. Koran 4. Kambuik Koman 5. Koto Tengah 6. Limau Sundai 7. Parak Gadang 8. Pale 9. Pondok Jago 10. Sitampuang 11. Duri
24	Sijunjung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gantiang 2. Kampung Baru 3. Kampung Berlian 4. Kandang Harimau 5. Padang Ranah

25	Aie Angek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapalo Koto 2. Koto Benek 3. Kulampi 4. Padang Doto 5. Sungai Duo 6. Silabau 7. Tanggalo
26	Solok Ambah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukik Tujuh 2. Koto Mudik 3. Koto Ranah 4. Rimbo Ambacang 5. Takung
27	Paru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batu Ranjau 2. Bukik Buar 3. Kampung Tarandam
28	Silokek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sangkiamo 2. Tanjung Medan
29	Durian Gadang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koto Ilie 2. Koto Mudik 3. Pinang 4. Silukah 5. Tanggalo
30	Buluh Kasok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koto Buluh Kasok 2. Koto Tengah 3. Taratak
31	Lubuk Tarok	<ol style="list-style-type: none"> 6. Andopan 7. Jambu Lipo 8. Koto Tuo 9. Padang Basiku 10. Silalak Kulik 11. Sungai Jodi 12. Tigo Korong
32	Lalan	<ol style="list-style-type: none"> 4. Batang Lalan 5. Batu Ajung 6. Lalan 7. Rumbai 8. Sikaladi
33	Silongo	<ol style="list-style-type: none"> 3. Koto Ranah 4. Pakorongan 5. Ranah Laweh
34	Kampung Dalam	<ol style="list-style-type: none"> 6. Koto 7. Limau Sundai 8. Palintangan
35	Latang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imbang Joyo 2. Tanjung Korong 3. Taratak
36	Mundam Sakti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kampung Pinang 2. Ranah Pasar 3. Tanjung Raya
37	Koto Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koto Panjang 2. Pasar 3. Simpang Ampek
38	Muaro Bodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dusum Tuo 2. Tanjung Pauh 3. Bungo Pinang

39	Palangki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lintas Harapan 2. Pantai Cermin 3. Ranah Tibarau 4. Tambang Ameh 5. Tanjung Udani
40	Koto Tuo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukik Malintang 2. Rantau Jambu 3. Koto Tengah
41	Batu Manjular	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batu Manjular Barat 2. Batu Manjular Timur
42	Padang Sibusuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guguak Tinggi 2. Kapalo Koto 3. Ladang Kapeh 4. Simancung 5. Tapi Balai
43	Pamuatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pamuatan Barat 2. Pamuatan Timur
44	Desa Kampung Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koto Tengah 2. Koto Panjang 3. Koto Lamo 4. Koto Ateh 5. Guguk Bulek
45	Limo Koto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aur Gading 2. Batu Balang 3. Batu Gandang 4. Koto Panjang 5. Mangkudu Kodok 6. Pasar Tanjung Ampalu 7. Solok Badak
46	Padang Laweh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukik Gombak 2. Koto Padang Laweh 3. Taratak Betung
47	Tanjung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kampung Juar 2. Koto Tanjung 3. Koto Tuo 4. Lumbaru 5. Tanjung Beringin 6. Taruko 7. Ujung Padang
48	Palaluar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bungo 2. Kampung Baru 3. Koto 4. Ranah 5. Sumpadang
49	Guguak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buluh Rotan 2. Koto Guguak 3. Padang Lalang
50	Bukik Bual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koto Mudik 2. Jalan Baru 3. Koto Tengah 4. Koto Hilir
51	Padang Laweh Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ranah Sigading 2. Taratak Baru 3. Sungai Gemuruh 4. Pasar Gambok

52	Kumanis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanjung Alam 2. Tanjung Gadang 3. Tanjung Raya 4. Tanjung Gadang Utara
53	Tanjung Bonai Aur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bonai 2. Koto Tinggi 3. Pauh 4. Laban Bungkok 5. Koto Baru 6. Koto Tengah
54	Sisawah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabun 2. Koto Sisawah 3. Koto Baru 4. Rumbai 5. Sungai Tampang 6. Simawik 7. Sibolin
55	Tamparungo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koto Lamo 2. Pangkahan Sungai Loban 3. Simaru 4. Sitongek 5. Sitongek Selatan 6. Koto Lamo Utara
56	Sumpur Kudus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pintu Rayo 2. Tarak Sipuah 3. Taratak Tengah 4. TombangUjung Luhak 5. Kampuang Rajo 6. Koto 7. Batang Somi 8. Payo Syahadat
57	Mangganti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Balai Lamo 2. Taruko 3. Tapi Balai
58	Silantai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinkin 2. Koto Ateh 3. Koto Tengah 4. Ujuang Koto 5. Batang Kinkin
59	Unggan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lubuak Batapuak 2. Unggan Aro 3. Unggan Bukik 4. Unggan Koto
60	Tanjung Bonai Aur Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pincuran VII 2. Aur Seriau 3. Payo Lowe 4. Kuok 5. Puntian
61	Tanjuang Labuah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sibiluru 2. Sipuah 3. Simpang Sawah Silupak
62	Sumpur Kudus Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uncang Labuah 2. Calau 3. Kampung Baru

Dengan semakin mantapnya Undang-Undang Otonomi Daerah di seluruh Indonesia, khususnya untuk Sumatera Barat, pemerintahan ditingkat Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan terendah sudah berjalan dengan baik. Sampai akhir tahun 2019, dimana untuk Kabupaten Sijunjung terbentuk atas 8 Kecamatan, 61 Nagari dan 1 Desa

Kehidupan sosial budaya masyarakat Kabupaten Sijunjung sangat kental dengan filsafat adat Suku Minangkabau, sebagai suku mayoritas yang berbunyi, “Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah”. Hal ini dapat dimaknai kalau Islam sebagai agama mayoritas sangat berperan dalam keseharian masyarakatnya.

C. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Sejak awal, pembangunan manusia sudah menjadi tujuan dalam model pembangunan di Indonesia, setidaknya dalam tataran normatif tercermin dalam falsafah Negara seperti Pancasila, UUD 1945, dan dokumen-dokumen kenegaraan lainnya. Berbagai model untuk mengukur keberhasilan pembangunan telah banyak dikembangkan, diantaranya konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan (*economic growth*), pembangunan sumber daya manusia (*human resource development*), kebutuhan dasar (*basic needs*), dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan memandang bahwa keberhasilan pembangunan suatu wilayah hanya ditandai oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, tanpa melihat aspek-aspek lainnya seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan yang masih tinggi, dan sebagainya. Pembangunan sumber daya manusia memandang manusia sebagai input dalam proses produksi, seperti halnya dengan faktor-faktor produksi lainnya yaitu, tanah, modal dan mesin. Manusia digunakan sebagai sarana untuk mengejar tingkat output yang tinggi tetapi dalam proses ini manusia bukan sebagai pewaris dari apa yang telah dihasilkan. Pembangunan yang mempunyai pendekatan kebutuhan dasar hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia agar dapat keluar dari perangkat kemiskinan tanpa memiliki pilihan-pilihan dalam meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan pembangunan dengan kesejahteraan manusia memandang manusia dalam proses pembangunan hanya sebagai penerima bukan sebagai peserta yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan (*agen pembangunan*). Semua model pembangunan tersebut dinilai masih bersifat parsial/tunggal.

Tahun 1990 UNDP (United Nations Development Programme) dalam laporannya "Global Human Development Report" memperkenalkan konsep "Pembangunan Manusia (Human Development)", sebagai paradigma baru model pembangunan. Menurut UNDP, pembangunan manusia dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging the choices of people), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah "perluasan pilihan" dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut.

Pada saat yang sama pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan (formation) kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan, sekaligus sebagai pemanfaatan (utilization) kemampuan/keterampilan mereka tersebut. Konsep pembangunan di atas jauh lebih luas pengertiannya dibandingkan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan (economic growth), kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat, atau pengembangan sumber daya manusia. Hal ini terkait konsep pembangunan manusia UNDP yang mengandung empat unsur yaitu: produktivitas (productivity), pemerataan (equity), kesinambungan (sustainability), dan pemberdayaan (empowerment).

Pembangunan manusia dapat juga dilihat dari sisi pelaku atau sasaran yang ingin dicapai. Dalam kaitan ini UNDP melihat pembangunan manusia sebagai suatu "model" pembangunan tentang penduduk, untuk penduduk, dan oleh penduduk: a. tentang penduduk, berupa investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya, b. untuk penduduk, berupa penciptaan peluang kerja melalui perluasan (pertumbuhan) ekonomi dalam negeri, dan c. oleh penduduk; berupa upaya pemberdayaan (empowerment) penduduk dalam menentukan harkat manusia dengan cara berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan (UNDP, HDR 1990).

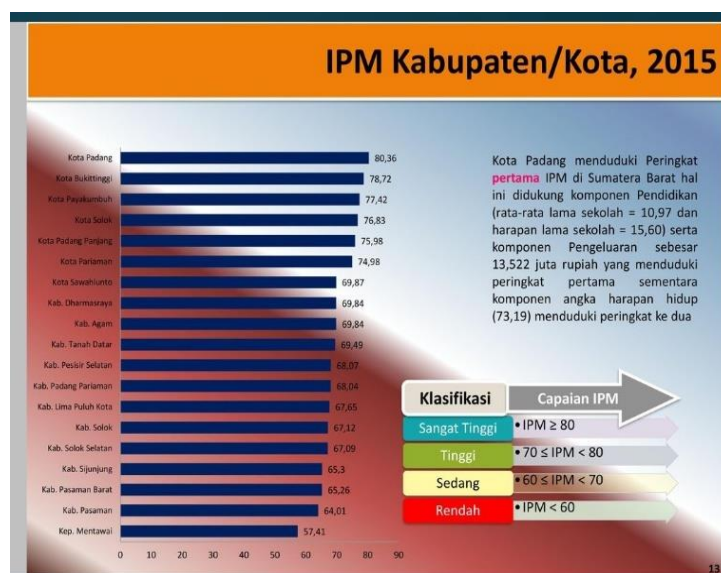
Menurut UNDP upaya ke arah "perluasan pilihan" hanya mungkin dapat direalisasikan jika penduduk paling tidak memiliki: peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif. Dengan kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut sudah dapat merefleksikan, secara minimal, tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah (BPS UNDP, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, Perbandingan Antarprovinsi 1990-1993). Untuk mengukur tingkat pemenuhan ketiga unsur di atas, UNDP menyusun suatu indeks komposit berdasarkan pada 4 (empat) indikator yaitu: Angka Harapan Hidup (life

expectancy at age 0: e0), Angka Melek Huruf penduduk dewasa (adult literacy rate: AMH), Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling: MYS) ,dan Purchasing Power Parity (PPP).

Angka harapan hidup mengukur dimensi "umur panjang dan sehat", angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur dimensi "pengetahuan dan keterampilan", dan purchasing power parity mengukur dimensi kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Ketiga indikator inilah yang digunakan sebagai komponen dalam penyusunan HDI (Human Development Index) yang diterjemahkan menjadi IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Penghitungan IPM UNDP digunakan untuk perbandingan kemajuan pembangunan manusia antar negara. Sedangkan BPS mengaplikasikan penghitungan IPM tersebut untuk melihat kemajuan pembangunan manusia di Indonesia baik pada level provinsi maupun level kabupaten/kota. BPS melakukan beberapa penyesuaian pada penghitungan IPM, yaitu pada komponen pendidikan dan ekonomi.

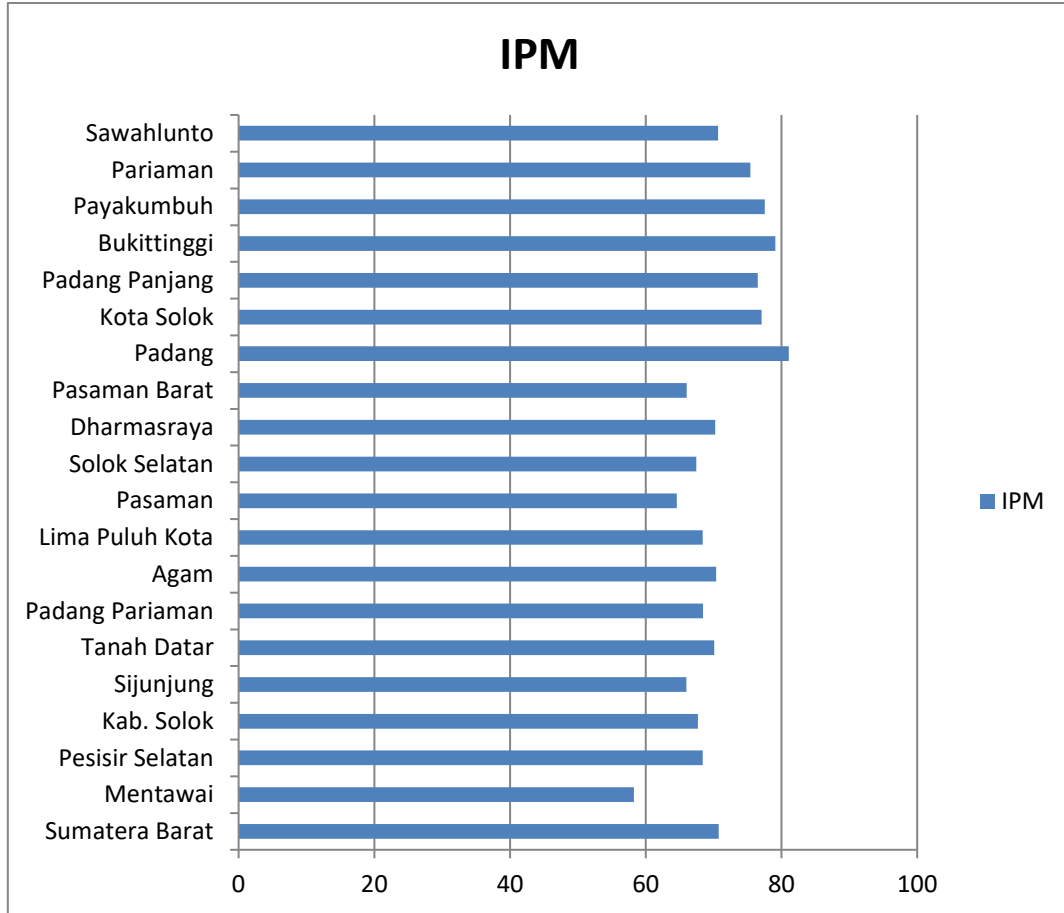
Pada komponen pendidikan, BPS menggunakan MYS bukan APS karena APS merupakan indikator input, sementara MYS merupakan indikator output yang lebih mampu menggambarkan pencapaian di bidang pendidikan. Kemudian pada komponen ekonomi, BPS menggunakan PPP dengan pendekatan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan karena lebih mampu menggambarkan daya beli masyarakat dibandingkan dengan Gross Domestic Product (GDP).

Gambar 4. IPM Kab/Kota se Sumatera Barat



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sumatera Barat

Gambar 5. IPM Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2017



Sumber: BPS Propinsi Sumatera Barat

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa IPM Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2017 sebesar 65.3 yang berada pada klasifikasi sedang. IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standarisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

D. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Pada gambar berikut dapat kita lihat angka IPG Kabupaten Sijunjung pada tahun 2018.

Gambar 6. IPG Kab/Kota se Sumatera Barat

Wilayah	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER KABUPATEN/ KOTA PROVINSI SUMBAR	
	Indeks Pembangunan Gender 2017	Indeks Pembangunan Gender 2018
Kepulauan Mentawai	89.13	89.45
Pesisir Selatan	94.98	94.62
Kab.Solok	95.73	96.20
Sijunjung	93.40	93.21
Tanah Datar	98.51	97.58
Padang Pariaman	93.79	93.07
Agam	97.16	96.92
Lima Puluh Kota	94.62	94.93
Pasaman	93	92.61
Solok Selatan	94.54	94.92
Dharmasraya	88.43	88.26
Pasaman Barat	88.97	89.59
Padang	93.77	93.77
Kota Solok	96.70	97.24
Sawahlunto	95.50	95.68
Padang Panjang	97.76	97.77
Bukittinggi	98.78	98.80
Payakumbuh	98.53	98.54
Pariaman	98.95	98.61
SUMATERA BARAT (Provinsi)	94.16	94.17

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sumatera Barat

Pada tahun 2018, IPG Kabupaten Sijunjung sebesar 93,21 dan menduduki peringkat 16 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan Kabupaten Sijunjung tergolong pada status pembangunan gender tergolong tinggi bila dibandingkan dengan indek IPM dengan capaian 65,3.

E. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG berguna untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. IDG menitik beratkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Adapun data Angka IDG Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 7. IDG Kab/Kota se Sumatera Barat

Kode	Provinsi/Kab/Kota	Keterlibatan perempuan di Parlemen	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	Sumbangan Pendapatan Perempuan	IDG
		(%)	(%)	(%)	
1300	SUMATERA BARAT	10,77	57,64	37,40	65,01
1301	Kepulauan Mentawai	0,00	41,07	30,84	46,90
1302	Pesisir Selatan	4,44	63,48	34,05	53,46
1303	Solok	8,57	59,66	39,08	62,16
1304	Sijunjung	10,00	61,50	28,16	56,84
1305	Tanah Datar	8,57	59,15	33,42	58,41
1306	Padang Pariaman	5,00	51,55	31,10	54,48
1307	Agam	2,22	61,17	38,70	54,16
1308	Lima Puluh Kota	8,57	75,08	28,35	46,81
1309	Pasaman	8,57	55,10	38,33	63,78
1310	Solok Selatan	0,00	49,68	36,46	51,17
1311	Dharmasraya	4,00	57,19	26,76	48,91
1312	Pasaman Barat	2,50	57,33	36,36	54,42
1371	Kota Padang	15,56	53,25	34,51	69,01
1372	Kota Solok	5,00	62,44	36,19	56,20
1373	Kota Sawah Lunto	20,00	55,09	27,90	65,86
1374	Kota Padang Panjang	20,00	59,75	46,52	76,10
1375	Kota Bukittinggi	8,00	58,02	37,29	62,11
1376	Kota Payakumbuh	8,00	58,66	38,13	61,99
1377	Kota Pariaman	5,00	63,90	30,91	51,34

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sumatera Barat

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa IDG Kabupaten Sijunjung pada tahun 2017 sebesar 56,84. Hal ini menunjukkan masih rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen, keterlibatan perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi serta sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

F. Ketimpangan Gender Dalam Pembangunan

Pada dasarnya pembangunan ditujukan untuk mencapai kesejahteraan semua penduduk, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan maupun jenis kelamin. Pencapaian

pembangunan pada umumnya dinyatakan dengan adanya perubahan menuju kondisi yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya atau sebaliknya. Berbagai metode telah banyak digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran sederhana yang dapat menggambarkan pembangunan manusia.

IPM mampu menangkap kemajuan pembangunan dalam tiga kemampuan dasar manusia yaitu umur panjang dan sehat, pendidikan, serta untuk menikmati standar kehidupan yang layak. Walaupun IPM memberikan gambaran yang jelas tentang pembangunan manusia dan mempertimbangkan kemajuan manusia yang lebih luas, tetapi IPM belum dapat menjelaskan kesenjangan capaian pembangunan perempuan dibandingkan laki-laki. Indikator Pembangunan Manusia yang terkait dengan gender dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Selisih antara angka IPM dan Angka IPG dapat dimaknai sebagai “bias” gender dalam pembangunan.

Konkretnya, apabila angka IPG lebih kecil dari Angka IPM ($IPG < IPM$), maka terjadi ketidaksetaraan gender. Selanjutnya untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian dalam pemberdayaan gender dapat diukur dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG menggambarkan partisipasi aktif perempuan dalam politik, ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi, meskipun trennya terus naik tetapi dari indikator kompositnya dengan nilai stagnan.

1. Tingkat Kesetaraan Gender

Bersama-sama dengan IPM, IPG dapat menggambarkan kesetaraan dalam capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Berbeda dengan IPM, nilai IPG dihitung dengan mempertimbangkan capaian laki-laki dan perempuan, sehingga selisih antara keduanya akan menggambarkan tingkat kesetaraan gender. Jika nilai IPM sama dengan nilai IPG menunjukkan bahwa tidak terjadi ketimpangan pencapaian pembangunan perempuan dan laki-laki. Sebaliknya jika nilai IPG di bawah nilai IPM berarti terjadi ketimpangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Untuk mengetahui ketimpangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat dari besaran selisih nilai IPM dan nilai IPG. Semakin kecil selisih antara IPM dan IPG menunjukkan semakin kecil perbedaan capaian pembangunan perempuan dan laki-laki. Sebaliknya semakin besar selisih nilai IPM dan IPG menunjukkan semakin besar jarak (gap) capaian pembangunan

perempuan dari capaian pembangunan laki-laki. Indikator ini dapat menunjukkan seberapa jauh kesetaraan gender di suatu wilayah.

2. Hubungan IPM dan IPG

Secara umum, IPM mencerminkan pembangunan manusia suatu daerah sedangkan IPG menggambarkan pembangunan Gender yang menitikberatkan pada perluasan kemampuan antara laki-laki dan perempuan. Kedua nilai tersebut dari tahun ke tahun mengalami kenaikan baik pada tingkat nasional, provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Namun dibalik kenaikan tersebut masih menyisakan pertanyaan mengapa masih terjadi kesenjangan atau ketidak setaraan gender yang dapat dilihat dari selisih (gap) yang tercipta antara nilai IPM dan IPG.

Seperti yang kita ketahui, jika berbicara tentang ketidaksetaraan gender maka termasuk didalamnya pemikiran mengenai bagaimana memanfaatkan kemampuan yang dimiliki untuk berbuat maksimal dalam kehidupan. Salah satu upayanya adalah berbuat maksimal untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, proses pengambilan keputusan baik di bidang politik maupun penyelenggaraan pemerintahan. Unsur-unsur persamaan peranan tersebut merupakan komponen yang tercakup dalam penghitungan indeks pemberdayaan gender (IDG).

3. Hubungan IPG dan IDG

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menitikberatkan pada pengukuran peningkatan kemampuan baik laki-laki maupun perempuan sehingga tercapai kesetaraan dalam hal pencapaian kemampuan dasar manusia. Kesetaraan dalam pencapaian bagi perempuan memiliki arti penting tidak hanya dari segi status dan kedudukan, tetapi lebih kepada persoalan pemberdayaan. Dalam pengertian yang lebih luas pemberdayaan sudah mencakup adanya upaya peningkatan kapabilitas perempuan untuk berperanserta dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan serta memiliki kesempatan dalam kegiatan ekonomi. Pemberdayaan inilah yang coba diungkap oleh Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

IDG sendiri merupakan indeks komposit yang berupaya mengungkap peran perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang politik, sosial dan ekonomi. Secara teoritis,

semakin tinggi pencapaian pembangunan gender akan berdampak pada peningkatan peranan perempuan khususnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

IDG merupakan ukuran komposit yang dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek ekonomi maupun sosial. IDG menggambarkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik melalui indikator persentase perempuan di parlemen, keterlibatan perempuan dalam posisi strategis di dunia kerja melalui indikator persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi dan teknisi, serta menggambarkan keterlibatan perempuan sebagai penyumbang pendapatan rumah tangga melalui indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan.

BAB III

STRUKTUR PENDUDUK

A. Penduduk menurut Jenis Kelamin

Penduduk dalam pembangunan suatu negara sangat berperan penting, karena penduduk memiliki peran ganda dalam pembangunan. Penduduk bisa sebagai subjek maupun objek yaitu sebagai pelaku pembangunan sekaligus menjadi sasaran pembangunan. Dengan kata lain, akhir setiap tujuan pembangunan adalah meningkatkan kualitas hidup penduduk secara utuh dan menyeluruh yang biasanya diawali dengan perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan data kependudukan Tahun 2019 Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung yaitu sebanyak 233.810 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 117.178 jiwa, dan penduduk perempuan sebanyak 116.632 jiwa.

Distribusi Penduduk Kabupaten Sijunjung menurut jenis kelamin tahun 2019 pada tabel 3.1 dibawah ini menggambarkan bahwa proporsi penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sijunjung semakin berimbang.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (Ribu)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total	
1.	Kamang Baru	25.710	24.728	50.438	103,97
2.	Tanjung Gadang	12.471	12.771	25.242	97,65
3	Sijunjung	23.300	23.285	46.585	100,06
4.	Lubuk Tarok	7.577	7.761	15.338	97,63
5.	IV Nagari	8.653	8.666	17.319	99,85
6.	Kupitan	6.901	7.260	14.161	95,06
7.	Koto VII	19.377	19.188	38.565	100,98
8.	Sumpur Kudus	13.189	12.973	26.162	101,66

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Sijunjung tahun 2019

Berdasarkan tabel 3.1 diatas dapat dilihat bahwa penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Kamang Baru berjumlah 50.439 Jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Kupitan yaitu 14.161 Jiwa. Kecamatan dengan *sex ratio* terendah adalah Kupitan yaitu 95.06 yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan di Kecamatan Kupitan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Dengan berimbangnya

jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Sijunjung, maka kebijakan dan program-program pembangunan seyogyanya lebih difokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan.

B. Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin menunjukkan bahwa struktur umur penduduk di Kabupaten Sijunjung didominasi oleh penduduk muda. Frekuensi terbesar untuk penduduk laki-laki maupun perempuan berada pada kelompok umur 0-4 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran pada periode 5 tahun terakhir cukup tinggi.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sijunjung tahun 2018

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Ribu)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
1.	0 – 4	13.344	12.818	26.162
2.	5 – 9	12.630	12.323	24.953
4.	10 – 14	11.491	10.989	22.480
5.	15 – 19	9.492	9.155	18.647
6.	20 – 24	9.023	8.946	17.969
7.	25 – 29	9.591	9.504	19.095
8.	30 – 34	9.327	9.090	18.417
9.	35 – 39	8.526	8.688	17.214
10.	40 – 44	7.453	7.378	14.831
11.	45 – 49	6.641	6.487	13.128
12.	50 – 54	5.811	5.826	11.637
13.	55 – 59	4.937	5.179	10.116
14.	60 – 64	3.728	3.932	7.660
15.	65 +	5.184	6.317	11.501
	Jumlah/Total	117.178	116.632	233.810

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Sijunjung 2019

Berdasarkan tabel diatas, didapat gambaran bahwa 92.242 jiwa penduduk Kabupaten Sijunjung adalah anak usia 0-19 tahun. Sedangkan penduduk usia 65+ sebanyak 11.501 jiwa dari total jumlah penduduk di Kabupaten Sijunjung. Dengan tingginya persentase penduduk usia 0-19 tahun, maka kebijakan dan program-program pengembangan seyogyanya difokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

C. Penduduk menurut Jenis Usia Produktif

Komposisi penduduk menurut kelompok umur produktif digolongkan menjadi tiga, yaitu produktif (15-64 tahun), belum produktif (0-14 tahun), tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Merujuk pada tabel 2, penduduk Kabupaten Sijunjung berusia 0-14 tahun sebanyak 73.595 jiwa. Kemudian penduduk berusia 15-64 tahun sebanyak 148.714 jiwa. Dan penduduk berusia 65 tahun ke atas sebanyak 11.501 jiwa.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja selama seminggu yang lalu menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sijunjung Tahun 2018

No	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
1.	Berusaha Sendiri	18.011	10.562	28.573
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	9.972	8.987	18.959
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3.304	778	4.082
4.	Buruh/Karyawan/Pegawai	15.761	12.298	28.059
5.	Pekerja Bebas	11.322	3.611	14.933
6.	Pekerja Keluarga/Tak dibayar	3.331	8.124	11.455
Jumlah/Total		61.701	44.360	106.061

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Sijunjung

Tabel 3.3 Menunjukkan bahwa komposisi penduduk produktif dengan sektor pekerjaan keluarga/tak dibayar berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan yang hampir seimbang ini sangat potensial apabila diberdayakan. Tanpa mengesampingkan peran laki-laki sebagai kepala keluarga, maka peran perempuan untuk menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anak-anak. Kemudian, data dan informasi yang disajikan diharapkan dapat mengidentifikasi sebagian besar permasalahan perempuan dan anak dibidang pendidikan dalam membantu pengambilan keputusan untuk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB IV

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN SIJUNJUNG

A. Pengarusutamaan Gender (PUG) Merupakan Strategi Pemberdayaan

Pengarusutamaan Gender adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki dalam seluruh pembangunan di berbagai bidang kehidupan, mulai tahap perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Pemerintah telah menyatakan keberpihakannya untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dengan mengeluarkan kebijakan pengarusutamaan gender pada semua program kerjanya (Inpres No. 9 Tahun 2000). Namun, seiring dengan itu masih ditemukan adanya kesenjangan antara kebijakan yang berpihak pada keadilan gender dengan cara Pemerintah melakukan pengalokasian serta penggunaan anggarannya. Tujuan PUG adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

Oleh karena itu PUG bertugas untuk mempengaruhi atau mengintervensi berbagai kebijakan agar responsif gender. Kesetaraan dan keadilan Gender adalah suatu kondisi yang setara dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/ kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan, baik didalam maupun diluar rumah tangga. Pelaksanaan PUG diinstruksikan kepada seluruh Kementerian maupun lembaga pemerintah dan non departemen di pemerintah nasional, propinsi maupun di kabupaten/kota, untuk melakukan penyusunan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan, aspirasi perempuan pada pembangunan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Disadari bahwa keberhasilan pembangunan di Indonesia baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan penerima manfaat hasil pembangunan. Pada pelaksanaannya sampai saat ini peran serta kaum perempuan belum optimal. Oleh karena itu program pemberdayaan perempuan telah menjadi agenda bangsa dan memerlukan dukungan semua pihak.

Dalam upaya percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sijunjung, telah dilaksanakan berbagai kegiatan diantaranya dengan diseminasi/penyebarluasan konsep

dasar gender, pengarusutamaan gender dan perencanaan pembangunan berperspektif gender dikalangan penentu kebijakan. Hal ini harus menjadi prioritas karena disadari bersama bahwa pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, seyogyanya dapat difahami oleh para penentu kebijakan (stakeholders) saja, mengingat pengarusutamaan gender bertujuan untuk mengintervensi atau mempengaruhi kebijakan dalam pembangunan.

Dengan kata lain yang menjadi outcome terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender di masyarakat, pada gilirannya akan terlihat dari sejauh mana sebuah kebijakan itu dapat mendorong akses, partisipasi, kontrol dan manfaat masyarakat dalam pembangunan atau sebaliknya dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana yang tertuang dalam Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan sebuah alat (tools) yang dikenal dengan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Perencanaan dan Penganggaran. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

Perlunya sosialisasi PUG yang terus menerus, sebagai upaya mempercepat pemahaman PUG dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mengingat:

1. Adanya komitmen yang kuat dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender (KKG) melalui percepatan pemahaman PUG, sebagai strategi pemberdayaan perempuan sehingga bisa menekan Indeks ketimpangan Gender yang kita kenal dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
2. Komitmen tersebut adalah melaksanakan 7 Prasyarat PUG (Komitmen Politik, Kebijakan, SDM dan Anggaran, Penguatan Kelembagaan, Data Terpilah, Alat Analisa (Gender Analisa Pathway, dan Partisipasi Masyarakat). Jangan sampai ada kesan Peran PUG itu “Sosialisasi terus, Gitu-gitu aja. Maka bentuk tindaklanjutnya adalah Pelatihan PPRG dan Penerapan ARG. Sebagaimana dimaksud Permendagri No.67 Tahun 2011 Ttg Perubagan Atas Permendagri No.15 Tahun 2008 Ttg Pedoman PUG di Daerah.
3. Indikator komposit IPG sama dengan IPM, yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Daya Beli (Ekonomi). Bahwa IPM merupakan data gabungan dari laki dan perempuan, sedangkan IPG merupakan data terpilah antara laki dan perempuan.

4. Indeks Pembangunan Manusia dalam pembangunan secara komparatif identik dengan syariat Islam yang dapat diasumsikan dengan golongan Ulil Albab. Karena Indikator IPM itu tak ubahnya seperti do'a orang tua yang mendokan kita semua agar hidup kita selalu sehat, punya ilmu yang bermanfaat dan hidup bahagia sejahtera lahir batin.

Pemerintah dalam menjalankan program atau kegiatannya membutuhkan dana yang dituangkan dalam APBD maupun APBN. Adanya komitmen Pemerintah untuk menjalankan pengarusutamaan gender pada semua program kerjanya, seharusnya akan memunculkan APBN dan APBD yang sensitif gender. Dengan kata lain penggunaan APBD dan APBN demi kesejahteraan masyarakat, semestinya selalu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang berdasarkan pola hubungan yang tidak diskriminatif, baik menurut kelas sosial, agama, kelompok budaya, suku bangsa dan jenis kelamin.

B. Dasar Hukum dan Arah Kebijakan Pemberdayaan di Kabupaten Sijunjung

Isu Gender menyangkut masalah ketidakadilan yang menimpa baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi dalam banyak kasus ketidakadilan itu banyak menimpa perempuan, yang dialaminya baik di rumah, tempat kerja maupun di lingkungan masyarakat. Unsur penting yang menyebabkan timbulnya isu gender adalah hubungan gender yang timpang dan konsekwensinya terhadap seseorang dalam memperoleh akses, manfaat, keikutsertaan dalam memutuskan serta penguasaan terhadap sumber-sumber daya. Adapun yang disebut bentuk-bentuk ketidak-adilan gender, antara lain:

1. Subordinasi, yaitu Posisi /peran yang dinilai lebih rendah dari peran yang lain;
2. Marjinalisasi, yaitu Peminggiran peran ekonomi;
3. Beban Ganda, yaitu Beban kerja yang dibebankan;
4. Kekerasan, yaitu kekerasan yang dialami baik secara fisik maupun non fisik seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perdagangan orang (trafiking);
5. Pelabelan (Stereotipe), yaitu pemberian label yang menimbulkan anggapan yang salah.

Beberapa prinsip pengarusutamaan gender yang perlu diperhatikan dalam dalam pembangunan, yaitu:

1. PUG adalah strategi untuk lebih fokus dan efektif; bukan menggantikan program atau kebijakan yang spesifik dibutuhkan oleh perempuan dan oleh laki-laki;

2. Membutuhkan reorientasi dalam banyak hal (paradigma pembangunan: kerjasama sektor; pendanaan; indikator; sistem pendataan, dst);
3. Tidak berasumsi bahwa semua perencanaan pembangunan, kebijakan, dst itu netral sifatnya, atau tidak ada maksud diskriminatif;
4. PUG harus melembaga melalui langkah-langkah kongkrit;
5. Hasil PUG harus akuntable dan dimonitor secara berkelanjutan;
6. Dukungan politik; dukungan pimpinan; dukungan sumberdaya, dukungan media.

Demikian pula penyusunan Data Terpilah Statistik Gender dan Anak Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 ini dimaksudkan untuk menyajikan fakta dan kondisi pencapaian pembangunan masyarakat berperspektif gender, dan fakta terkait kondisi anak di Kabupaten Sijunjung.

BAB V

BIDANG PENDIDIKAN

Anak merupakan aset yang berharga bagi sebuah keluarga dan masyarakat dalam menjalani kehidupan kolektifnya untuk menyongsong masa depan. Kepedulian keluarga dan masyarakat pada anak dalam rangka tumbuh dan berkembang secara manusiawi, sedang melakukan investasi yang sangat menguntungkan bagi kelangsungan hidupnya. Sehingga mereka rela mencurahkan tenaga, biaya dan pikirannya demi tumbuh dan berkembangnya anak secara lebih baik. Untuk itu, lingkungan dan dukungan sosial kemasyarakatan yang baik, akan menjadikan anak tersebut menjadi satu generasi yang baik.

Kepedulian terhadap anak dilakukan dengan memenuhi salah satu hak anak, yaitu memperoleh pendidikan dan pengajaran yang dapat mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Menurut Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Pribadi, 2007) menekankan arti penting hak atas pendidikan sebagai kendaraan utama untuk meningkatkan dan memberdayakan anak-anak dari kemiskinan, sarana untuk berpartisipasi secara aktif dan total dalam pembangunan komunitas sosialnya dan sebagai jalan ampuh menuju peradapan manusia itu sendiri. Demikian juga dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*) juga dinyatakan bahwa setiap negara di dunia melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tentang pendidikan dengan mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar bagi semua secara bebas (Artikel 28).

UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, karenanya setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Undang Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat). Melalui UU tersebut, Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh anak dapat berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

A. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang menggambarkan besarnya tingkat partisipasi sekolah penduduk pada berbagai jenjang pendidikan. Angka partisipasi kasar dapat bernilai lebih di atas seratus persen karena penduduk yang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu bisa saja diluar rentang usia yang seharusnya bersekolah di jenjang pendidikan tertentu.

Angka Partisipasi Kasar (APK) mengindikasikan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan menurut jenjang pendidikan tanpa melihat umur. Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. Artinya data menggambarkan jumlah anak yang sedang bersekolah pada saat tertentu pada setiap jenjang pendidikan.

Tabel 5.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan Tahun 2019

No	Kecamatan	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kupitan	106,86	115,02	110,72	121,80	99,05	109,62	-	-	-
2	IV Nagari	102,31	109,33	105,66	143,70	125,71	133,55	-	-	-
3	Koto VII	105,53	102,12	103,85	80,37	84,44	82,42	-	-	-
4	Sumpur Kudus	106,58	108,11	107,31	104,89	113,92	109,31	-	-	-
5	Sijunjung	117,52	116,89	117,22	115,16	121,78	118,46	-	-	-
6	Lubuk Tarok	107,90	104,95	106,51	98,56	90,02	94,37	-	-	-
7	Tanjung Gadang	111,63	110,10	110,89	89,43	86,68	87,92	-	-	-
8	Kamang Baru	117,56	113,37	115,51	88,69	91,90	90,38	-	-	-
	Jumlah	111,21	110,38	110,81	101,06	101,17	101,12	-	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung

Tabel 5.1 menunjukkan jumlah anak yang bersekolah di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2019. APK di Kabupaten Sijunjung untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) yaitu 110,81 persen, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 101,12 persen, dan Angka Partisipasi Kasar cenderung menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

B. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk

menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya.

Angka partisipasi murni sekolah menggambarkan besarnya tingkat partisipasi sekolah murni pada berbagai usia sekolah. Dilihat menurut jenjang pendidikan terlihat kecenderungan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka angka partisipasi murni sekolah akan semakin kecil. Hal ini juga mengindikasikan semakin tingginya angka putus sekolah seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Dengan demikian, APM digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. APM Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 5.2 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan Tahun 2019

No	Kabupaten	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kupitan	96,81	98,42	97,57	99,18	78,01	87,85			
2	IV Nagari	91,68	98,02	94,71	103,70	101,01	102,18			
3	Koto VII	93,12	94,85	93,97	65,61	71,11	67,37			
4	Sumpur Kudus	95,22	98,43	96,75	84,20	100,90	92,38			
5	Sijunjung	105,19	105,95	104,52	90,33	101,99	96,14			
6	Lubuk Tarok	93,76	94,63	94,17	69,71	74,81	72,22			
7	Tanjung Gadang	100,23	101,12	100,66	63,14	73,36	68,74			
8	Kamang Baru	106,04	105,34	105,70	71,88	80,94	76,64			
Jumlah		98,98	100,75	99,83	78,68	85,59	82,25			

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung

Berdasarkan tabel 5.2 diatas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni Kabupaten Sijunjung penduduk yang sekolah tepat waktu pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar adalah 99,83 persen. Angka tersebut mengalami penurunan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

C. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur

Angka partisipasi sekolah merupakan suatu indikator yang menggambarkan tingkat partisipasi sekolah penduduk pada kelompok umur tertentu. Dilihat menurut kelompok umur terlihat kecenderungan bahwa semakin tinggi kelompok usia sekolah penduduk maka angka partisipasi sekolahnya akan semakin kecil.

APS merupakan ukuran daya serap system pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS merupakan persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu. Indikator APS digunakan sebagai ukuran daya serap system pendidikan nasional terhadap penduduk usia sekolah. Indikator ini tidak memperhitungkan jenjang pendidikan, lembaga, maupun kualitas pendidikan yang sedang ditempuh. APS Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur tahun 2018

No	Kabupaten	7-12			13-15			16-18		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kupitan			104,74			111,90			
2	IV Nagari			104,98			119,43			
3	Koto VII			97,01			86,70			
4	Sumpur Kudus			98,84			110,70			
5	Sijunjung			108,55			116,51			
6	Lubuk Tarok			98,64			101,22			
7	Tanjung Gadang			102,39			84,09			
8	Kamang Baru			108,78			91,56			
Jumlah				103,64			100,80			

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung

Dari tabel 5.3 diatas dapat dilihat bahwa Persentase Angka Partisipasi Sekolah penduduk berusia 7 hingga 12 tahun yaitu 103,64. Angka tersebut menurun pada penduduk usia 13 hingga 15 tahun.

D. Angka Putus Sekolah menurut jenjang Pendidikan

Pendidikan merupakan hak yang sangat fundamental bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dan terarah. UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Selanjutnya, dalam UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 49 juga disebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Namun, pada kenyataannya tidak semua anak mempunyai kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan seluas-luasnya hingga menyebabkan mereka putus sekolah. Putus sekolah didefinisikan sebagai seseorang yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan atau berhenti bersekolah dalam suatu jenjang pendidikan tersebut.

Tabel 5.4 Angka Putus Sekolah menurut Jenjang Pendidikan

No	Kabupaten	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Sijunjung			0,12			1,97			-
Jumlah				0,12			1,97			

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung

Berdasarkan tabel diatas angka putus sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar yaitu 0,12 dan angka tersebut meningkat pada jenjang pendidikan SLTP sebesar 1,97.

E. Penduduk menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan

Gambaran mengenai kualitas Sumber Daya Manusia salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan akan semakin baik kualitas penduduknya yang juga menggambarkan kemajuan suatu negara.

Tabel 5.5 Penduduk menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan

No	Kabupaten	SD			SLTP			SLTA			Akademik/PT
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L+P
1	Sijunjung			39,104			28,286			31,134	10,121

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung

Pada tabel 5.5 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk kabupaten sijunjung yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 39,104, yang artinya lebih tinggi dibandingkan penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi.

F. Rata-rata lama sekolah

Tabel 5.6 rata-rata lama sekolah

No	Kabupaten	JK		L+P
		L	P	
1	Sijunjung			7,92
Jumlah				7,92

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung

F. Sertifikasi Guru

Tabel 5.7 Sertifikasi Guru

No	Kabupaten	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Sijunjung			873			386			
Jumlah				873			386			

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung

G. Kelulusan Paket A,B dan C.

Tabel 5.8 rata-rata lama sekolah

No	Kabupaten	Paket A			Paket B			Paket C		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Sijunjung			13			77			
Jumlah				13			77			

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung

BAB VI

BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas setiap aspek yang berkaitan dengan kesehatan, baik dalam hal akses atas sumber daya kesehatan maupun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Berhak atas akses ke sumber daya kesehatan berarti setiap orang dapat dengan mudah untuk menjangkau fasilitas kesehatan yang dibutuhkan dan juga berhak untuk mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan kesehatan. Selain itu setiap orang juga berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman bermutu dan maksimal sesuai dengan keluhan yang diderita serta dengan pembiayaan yang terjangkau.

Permasalahan bidang kesehatan yang paling mendasar adalah belum meratanya fasilitas dan tenaga kesehatan yang tersedia di setiap daerah. Selain itu masih tingginya pembiayaan yang harus ditanggung oleh masyarakat dalam mengobati keluhan kesehatan tertentu juga menambah daftar permasalahan kesehatan. Padahal, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, tiga hal tersebut mutlak harus dibenahi atau diselesaikan. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut pemerintah telah melakukan pembangunan di bidang kesehatan secara terus menerus dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Pembangunan kesehatan yang dilakukan haruslah bermanfaat bagi setiap orang dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial, jenis kelamin, agama dan lain-lain. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan akan menodai tujuan pembangunan itu sendiri yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Agar pembangunan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya pengawasan yang melekat terhadap program-program yang sedang dilaksanakan dan evaluasi terus menerus terhadap program-program yang telah dilaksanakan.

Pengawasan dan evaluasi memerlukan data dan informasi yang akurat. Karena dari data dan informasi tersebut dapat dilihat apakah program-program pembangunan yang dilaksanakan telah bermanfaat bagi masyarakat ataukah belum dan apakah program yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan. Data dan informasi tersebut biasanya berupa indikator-indikator yang berkaitan dengan kesehatan. Beberapa indikator yang dapat digunakan diantaranya adalah angka harapan hidup, status kesehatan penduduk yang diukur melalui angka kesakitan (morbidity rate), yaitu penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktifitas sehari-hari disertai jenis-jenis keluhannya, akses ke pelayanan kesehatan yang meliputi cara berobat, jenis-jenis obat yang digunakan dan fasilitas kesehatan, ukuran fertilitas yang mencakup umur kawin pertama, keluarga berencana (KB) yang meliputi status pemakaian alat KB dan jenis-jenis alat KB yang digunakan.

Kesejahteraan merupakan hal atau keadaan sejahtera, aman, selamat, dan tentram. Kesejahteraan meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan adalah status kesehatan masyarakat. Semakin baik kesehatan masyarakat, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Sehubungan dengan itu, maka penyajian data kesehatan dengan perspektif gender merupakan salah satu cara untuk dapat mengingatkan kita dan para pemangku kebijakan agar senantiasa memberikan perhatian yang serius dan khusus terhadap persoalan-persoalan kesehatan perempuan dan anak.

A. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya.

Tabel 6.1 Jumlah Angka Kematian Ibu Melahirkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kupitan	0
2	IV Nagari	0
3	Koto VII	1
4	Sumpur Kudus	1
5	Sijunjung	2
6	Lubuk Tarok	0
7	Tanjung Gadang	0
8	Kamang Baru	1
Jumlah		5

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

Tabel diatas menunjukkan bahwa angka kematian ibu di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2018 sebanyak 6 orang. Angka tersebut menjelaskan bahwa rendah tingkat kematian ibu di Kabupaten Sijunjung. Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat telah memahami dan mampu menjaga kesehatan sebagai Ibu hamil.

B. Penyebab Kematian Ibu Melahirkan

Tabel 6.2 Jumlah Penyebab Kematian Ibu Melahirkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2018

No	Kecamatan	Penyebab kematian ibu							
		Eklamsia (%)	Infeksi (%)	Abortus (%)	P.Lama/Macet (%)	Emboli Obstetri (%)	Kompl Masa Puepureum (%)	Lain-lain (%)	Perdarahan (%)
1	Kupitan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	IV Nagari	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Koto VII	-	-	-	-	-	-	1	-
4	Sumpur Kudus	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Sijunjung	1	-	-	-	1	-	-	-
6	Lubuk Tarok	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanjung Gadang	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kamang Baru	-	-	-	-	-	-	-	1
Jumlah		1				1		1	2

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada penyebab spesifik yang sering terjadi dalam kematian ibu melahirkan. Pada tahun 2018 kematian ibu melahirkan hanya disebabkan oleh hal lain-lain dan perdarahan.

C. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Posyandu dan Puskesmas

K1 adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator akses ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan alternatif serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat. K4 adalah kontak ibu hamil sebanyak empat kali atau lebih dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar.

Tabel 6.3 Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Posyandu dan Puskesmas

No	Kecamatan	Jumlah	
		K1	K4
1	Kupitan	220	204
2	IV Nagari	282	227
3	Koto VII	877	785
4	Sumpur Kudus	462	411
5	Sijunjung	1.022	914
6	Lubuk Tarok	327	266
7	Tanjung Gadang	625	603
8	Kamang Baru	1.171	1.036
Jumlah		4.986	4.446

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

Berdasarkan tabel 6.3 dapat dilihat bahwa kunjungan Ibu Hamil menurut kecamatan yang memiliki jumlah tertinggi pada K1 adalah Kamang Baru sebesar 1.171 dan jumlah terendah adalah Kupitan sebesar 220. Sedangkan untuk K4 jumlah tertinggi yaitu pada Kamang Baru adalah 1.036 dan jumlah terendah yaitu Kupitan sebesar 204

D. Penderita HIV/AIDS

Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia, dengan akibatnya

turunnya/hilangnya daya tahan tubuhnya, sehingga mudah terjangkit dan meninggal. Hingga saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya atau obat untuk penyembuhannya. HIV/AIDS secara nyata ada di Indonesia dari pemeriksaan darah yang sangat terbatas diketahui keberadaannya. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Sijunjung belum terinput didalam data. Namun besarnya potensi masyarakat yang dapat terinfeksi HIV/AIDS maka perlu ditingkatkan upaya untuk menemukenali penderita HIV/AIDS di Kabupaten Sijunjung.

Tabel 6.4 Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Sijunjung

No	Kecamatan	< 1 Th		1-4		5-14		15-19		20-29		30-39		40-49		50-59		>60	
		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
1	Kupitan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	IV Nagari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Koto VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sumpur Kudus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Lubuk Tarok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanjung Gadang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kamang Baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

E. Keluarga Berencana

Keluarga berencana menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Pada dasarnya tujuan umum program KB adalah meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk dengan jalan menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan melalui alat kontrasepsi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selalu menekankan pentingnya menghindari 4T dalam perencanaan keluarga berencana. Yang dimaksud menghindari 4T adalah melahirkan Terlalu muda, Terlalu banyak anak, Terlalu rapat jarak kelahiran dan

Terlalu tua. Apabila 4T ini berhasil dihindari maka tujuan program KB akan dapat terwujud. Adapun data jumlah KB di Kabupaten Sijunjung dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 6.5 Jumlah Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2018

No	Kecamatan	Peserta KB Perempuan						Peserta KB Laki-laki			Total
		MOW	IUD	Implant	Suntik	Pil	Jumlah	MOP	Kondom	Jumlah	
1	Tanjung Gadang	84	44	255	3.253	761	4.397	12	76	88	4.485
2	Sijunjung	258	467	752	2.472	546	4.495	21	78	99	4.594
3	IV Nagari	221	100	300	942	303	1.866	8	44	52	1.918
4	Koto VII	141	128	1.289	2.435	666	4.659	11	118	129	4.788
5	Kamang Baru	179	135	1.042	5.199	1.575	8.130	13	144	157	7.287
6	Sumpur Kudus	65	104	676	2.130	658	3.633	6	29	35	3.668
7	Lubuk Tarok	88	100	528	1.093	496	2.305	14	30	44	2.349
8	Kupitan	154	121	217	493	152	1.141	1	26	27	1.168
Jumlah		1.190	1.199	5.059	18.021	5.157	30.626	86	545	631	31.257

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung

Tingginya penggunaan suntik KB menandakan bahwa para pengguna merasa aman dan nyaman dengan suntik. Selain itu bila dilihat dari periode penyuntikan dengan waktu 1 bulan dan 3 bulan sekali dinilai tidak merepotkan dan hemat dalam segi pengeluaran

BAB VII

BIDANG KETENAGAKERJAAN

Tujuan pembangunan nasional adalah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setara dengan negara maju. Ketenagakerjaan merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah dalam rangka pembangunan nasional. Indikator ketenagakerjaan merupakan indikator penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, karena dapat memberikan gambaran tentang daya serap pembangunan.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada suatu kelompok masyarakat, sebagian besar dari mereka, utamanya telah memasuki usia kerja, diharapkan terlibat di lapangan kerja tertentu atau aktif dalam kegiatan perekonomian. Penduduk yang telah memasuki usia kerja dapat dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang menganggur/pengangguran.

Di Indonesia, data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) adalah keterangan perorangan dari setiap anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun ke atas. Meski demikian, informasi yang disajikan hanya mencakup penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

Pembahasan mengenai ketenagakerjaan menjadi lebih menarik apabila dilihat dari segi partisipasi laki-laki maupun perempuan di dalam dunia kerja. Keterlibatan perempuan dalam pasar kerja dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Semakin banyak perempuan yang bekerja, menunjukkan semakin banyak perempuan yang mampu mengaktualisasikan dirinya dan semakin kecil ketimpangan partisipasi bekerja antara perempuan dan laki-laki pada pasar kerja.

Akan tetapi, dibandingkan dengan laki-laki biasanya perempuan relatif lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang bernilai ekonomis baik. Kebanyakan perempuan bekerja disektor informal dan tidak terlindungi dan tidak jarang mereka menjadi pekerja yang tidak dibayar, dan menjadi pengangguran. Oleh sebab itu data statistik berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten

Sijunjung penting untuk disajikan untuk melihat tingkat pemerataan gender disektor pasar kerja dan untuk mengukur kesejahteraan perempuan di Kabupaten Sijunjung.

A. Tenaga Kerja Migran Antar Kerja Antar Negara (AKAN)

Tabel 7.1 Tenaga Kerja Migran Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Kabupaten Sijunjung

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		L+P
		L	P	
1	SUMPUR KUDUS	-	5	5
2	KOTO VII	5	4	9
3	SIJUNJUNG	3	2	5
4	KUPITAN	-	-	-
5	IV NAGARI	11	2	13
6	LUBUK TAROK	1	1	2
7	TANJUNG GADANG	-	-	-
8	KAMANG BARU	-	-	-
JUMLAH		20	14	34

Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung

Tabel diatas menunjukkan jumlah Tenaga Kerja Migran Antar Kerja Antar Negara yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 20 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 14 orang. Angka tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam Tenaga Kerja Migran Antar Kerja Antar Negara.

B. Pekerja di Sektor Formal

Tabel 7.2 Pekerja di Sektor Formal Kabupaten Sijunjung

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		L+P
		L	P	
1	SUMPUR KUDUS	35	61	96
2	KOTO VII	87	98	185
3	SIJUNJUNG	91	158	249
4	KUPITAN	25	62	87
5	IV NAGARI	37	49	86
6	LUBUK TAROK	13	20	33
7	TANJUNG GADANG	36	43	79
8	KAMANG BARU	48	62	110
JUMLAH		372	553	925

Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung

Tabel 7.2 menunjukkan jumlah terbanyak pekerja di sektor formal menurut jenis kelamin adalah perempuan yaitu sebanyak 553 orang kemudian diikuti dengan jumlah

pekerja laki-laki di sektor formal sebanyak 372 orang. Angka tersebut menggambarkan bahwa sangat tinggi keterlibatan perempuan di sektor formal.

C. Pekerja di Sektor Informal

Tabel 7.3 Pekerja di Sektor Informal Kabupaten Sijunjung

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		L+P
		L	P	
1	SUMPUR KUDUS	-	-	-
2	KOTO VII	3	4	7
3	SIJUNJUNG	3	3	6
4	KUPITAN	4	2	6
5	IV NAGARI	-	-	-
6	LUBUK TAROK	-	-	-
7	TANJUNG GADANG	-	2	-
8	KAMANG BARU	2	-	-
JUMLAH		12	11	23

Sumber Data : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pekerja laki-laki dan perempuan di sektor informal hampir seimbang. Angka tersebut juga menggambarkan bahwa sudah ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai pekerja di sektor informal.

BAB VIII

BIDANG POLITIK

A. Anggota DPRD

Fakta menunjukkan, peran perempuan Indonesia secara progresif banyak menduduki posisi penting, meskipun persentasenya masih lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Berkat perjuangan gigih koalisi para aktivis permasalahan perempuan dan koalisi perempuan anggota parlemen, telah berhasil mengundangkan secara formal dalam pasal 65 undang-undang pemilu No. 12 tahun 2003.

Pasal tersebut adalah 65 ayat (1) dan (2), yang dikenal dengan sebutan "kuota" untuk perempuan, lengkapnya pasal tersebut berbunyi:

- (1) Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.
- (2) Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon sebanyak banyaknya 120 persen jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan.

Sementara Pasal 67 ayat (1) berbunyi :

"Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang diajukan partai politik peserta pemilu merupakan hasil seleksi secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal parpol".

Sehingga meskipun ada peluang bagi perempuan untuk berkiprah di bidang politik, khususnya menjadi calon legislatif, tetap saja kesempatan tersebut bergantung kepada pimpinan partai politik yang memiliki kuasa untuk menetapkan nomor urut calon legislatifnya. Dilain pihak, perempuan terjun ke dunia politik harus mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan laki-laki, dalam hal ini, perempuan harus turut aktif dalam kepengurusan partai politik dan membekali diri dengan memenuhi kapasitas, kompetensi dan kualifikasi sebagai warga politik dengan tetap dalam koridornya sebagai perempuan.

Dalam lingkup sosial dan dunia politik masyarakat Kabupaten Sijunjung telah memberikan ruang bagi perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik. Meskipun demikian keterlibatan perempuan di lembaga legislatif (DPRD) masih belum dianggap proporsional.

Hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Faktor internal yang berasal dari diri perempuan itu sendiri seperti pendidikan, pengalaman di organisasi maupun partai politik, kemampuan ekonomi, kepercayaan diri dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternalnya seperti kebijakan politik, sistem kepartaian, nilai-nilai budaya yang bias gender, dukungan keluarga, dan lain-lain.

Tabel 8.1 Anggota DPRD Kab.Sijunjung

No	Kabupaten	Jenis Kelamin		
		L	P	L + P
1.	Sijunjung	27	3	30

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bahwa keterlibatan perempuan pada ranah legislatif di Kabupaten Sijunjung masih rendah yaitu hanya 10% dan tidak memenuhi kuota perempuan menurut Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen”. Maka perlu adanya peningkatan keterlibatan perempuan di ranah legislatif.

BAB IX

BIDANG HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

Dengan jumlah penduduk yang besar dan heterogen, Pemerintah Kabupaten Sijunjung memiliki tantangan cukup berat dalam mengelola masalah kesejahteraan sosial warganya. Di samping hak-hak atas kebutuhan dasar semua warga harus terpenuhi, pemerintah juga berkewajiban menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Hal ini tersirat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Beberapa kelompok masyarakat yang dianggap memiliki masalah sosial dan rentan sosial antara lain pelaku kriminalitas yang menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan, penduduk lanjut usia dan penyandang disabilitas (dahulu disebut penyandang cacat). Terhadap kelompok masyarakat tersebut perlu diupayakan pemberdayaan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, tidak menjadi beban bagi kelompok masyarakat lain. Dalam hal ini dibutuhkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

A. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan menurut Jenis LAPAS dan Jenjang Pendidikan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Narapidana mengacu kepada orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas berusia di atas 18 tahun, sedangkan anak didik pemasyarakatan berusia hingga 18 tahun. Dengan penerapan sistem pemasyarakatan ini, narapidana dianggap bukan sebagai obyek melainkan subyek yang tidak berbeda dengan warga lainnya yang tidak luput dari berbuat salah kemudian perlu dibina agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga akhirnya dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, adanya penghuni Lapas perempuan sedikitnya menunjukkan bahwa pada masa sekarang perempuan pun dapat menjadi pelaku tindak kejahatan. Hal ini bertentangan

dengan stereotype di dalam masyarakat yang menggambarkan perempuan antara lain mempunyai ciri-ciri lemah lembut, penuh kasih sayang, penurut (Radar, 1989 dan Miller, 1991, dikutip dalam thesis oleh Wahyu Ernaningsih, UI). Dengan citra seperti ini, perempuan dirasa tidak mungkin melakukan kejahatan.

Di Kabupaten Sijunjung terdapat satu buah Lembaga Pemasyarakatan (lapas) yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung. Berikut data penghuninya.

Tabel 9.1 Penghuni Lembaga Pemasyarakatan menurut jenis LAPAS dan jenjang pendidikan Tahun 2018

No	Jenis Lapas	Pendidikan				Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	PT	
1	Umum (Laki-Laki)	114	80	81	9	284
2	Anak	-	-	1	-	1
3	Wanita	1	-	1	-	2
Jumlah		115	80	83	9	287

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa penghuni lembaga pemasyarakatan terbanyak menurut jenjang pendidikan yaitu SD sebesar 115 orang dan paling sedikit yaitu Perguruan Tinggi sebanyak 9 orang.

B. Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan menurut Jenis Kelamin

Tabel 9.2 Jumlah Penghuni Lapas menurut Jenis Kelamin

No	Uraian	Jenis Kelamin		
		L	P	L+P
1	Anak	1	-	1
2	Dewasa	284	2	286
Jumlah		285	2	287

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Muaro Sijunjung

Berdasarkan tabel 9.2 jumlah penghuni lapas terbanyak menurut jenis kelamin di Lembaga permasyarakatan Kelas II Muaro Sijunjung yaitu laki-laki sebanyak 285 orang. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih terbebas dari permasalahan hukum.

C. Pengguna NAPZA

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pengguna NAPZA di Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 9.3 Pengguna NAPZA

No	Kabupaten	Pengguna NAPZA		
		L	P	L+P
1	Sijunjung	2	-	2

BAB X

BIDANG PARTISI DI LEMBAGA EKSEKUTIF

Sejak era reformasi di Indonesia, perempuan mendapat peluang yang besar untuk menduduki jabatan politik yang penting di negara ini, seperti Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan. Seorang presiden dibantu oleh menteri, dan salah satunya yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh perempuan. Di tingkat pemerintahan terkecil seperti desa/kelurahan dipimpin oleh pak desa maupun pak lurah. Namun kenyataannya, pemimpin di desa maupun kelurahan ada juga yang perempuan. Selain menteri, presiden juga dibantu oleh lembaga pemerintah. Aparat pemerintah salah satunya yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS). Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam menjalankan program-program pemerintah. Dengan demikian, penempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dapat menciptakan kesetaraan gender di lingkungan pemerintah. Adapun jumlah PNS di Kabupaten Sijunjung sebagai berikut:

A. PNS menurut Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin

Tabel 10.1 PNS menurut Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin

No	Jenis Jabatan PNS	Jumlah PNS		L+P
		L	P	
1	Fungsional Umum	503	363	866
2	Fungsional Tertentu	583	1.878	2.461
3	Eselon I	1	-	1
4	Eselon II	25	2	27
5	Eselon III	108	29	137
6	Eselon IV	194	174	368
7	Eselon V	12	13	25
Jumlah		1.426	2.459	3.885

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Sijunjung 2018

Berdasarkan tabel diatas PNS di Kabupaten Sijunjung di dominasi oleh PNS yang memiliki jabatan fungsional tertentu. Dan PNS yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada PNS yang berjenis laki-laki, yaitu sejumlah 2.459 orang perempuan, 1.426 orang laki-laki. Meskipun perempuan sudah dapat menikmati kesetaraan dalam pekerjaan sebagai PNS, namun belum banyak berada pada posisi pengambilan keputusan. Semakin tinggi jabatan semakin kecil persentase perempuan yang menduduki jabatan tersebut.

Tabel 10.2 PNS Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS		L+P
		L	P	
1	SD	20	-	20
2	SLTP	38	12	39
3	SLTA	357	236	591
4	D I	-	-	-
5	D II	101	306	407
6	D III	101	407	508
7	S 1	703	1.449	2.152
8	S 2	103	63	166
9	S 3	-	-	-
Jumlah		1.423	2.462	3.885

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Sijunjung 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada jumlah PNS menurut jenjang pendidikan terbanyak adalah PNS yang berjenis perempuan sudah menamatkan S1 sejumlah 2.462 orang, dengan PNS yang berjenis kelamin laki-laki sejumlah 723 orang dan PNS yang berjenis kelamin perempuan sejumlah 1.423 orang.

B. Camat

Tabel 10.3 Camat Kab.Sijunjung

No	Kab/Kota	Jenis Kelamin		L+P
		L	P	
1	Kabupaten Sijunjung	8	0	8

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Sijunjung 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hanya laki-laki yang menduduki posisi sebagai camat dan belum ada keterlibatan perempuan sebagai pemimpin di wilayah kecamatan.

C. Kepala Desa / Lurah / Wali Nagari

Tabel 10.4 Kepala Desa/Lurah/Wali nagari Kab.Sijunjung

No	Kab/Kota	Jenis Kelamin		L+P
		L	P	
1	Kabupaten Sijunjung	62	0	62

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Sijunjung 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa hanya laki-laki yang menduduki posisi sebagai Kepala Desa/Lurah/wali nagari. Angka tersebut menggambarkan bahwa belum ada keberdayaan perempuan untuk memimpin nagari di Kabupaten Sijunjung.

D. Tim Baperjakat

Tabel 10.5 Tim Baperjakat

No	Kab/Kota	Jenis Kelamin		L+P
		L	P	
1	Kabupaten Sijunjung	6	3	9

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Sijunjung 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa hanya laki-laki yang menduduki posisi sebagai Tim Baperjakat yang menggambarkan tidak ada keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.

BAB XI

BIDANG EKONOMI

A. Usaha Mikro dan Kecil

Usaha industri mikro dan kecil adalah perusahaan/usaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1-4 orang (mikro) dan 5-19 orang (kecil). Usaha industri IMK merupakan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja tanpa harus mensyaratkan jenjang pendidikan formal yang tinggi, sehingga penyerapan tenaga kerja di sektor IMK ini cukup besar dibandingkan sektor lainnya.

Data statistik IMK memiliki arti yang sangat strategis dan menjadi masukan yang sangat berguna untuk berbagai kebijakan pemerintah terhadap pembangunan yang difokuskan pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, khususnya adalah IMK. Keterlibatan perempuan dalam ketenagakerjaan tidak hanya menarik untuk dilihat dari sisi sebagai pekerja, namun juga menarik dilihat dari sisi perempuan sebagai pengusaha. Hal tersebut menunjukkan peran penting perempuan yang sudah mampu untuk mandiri dan bahkan mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dalam hal ini, kelompok usaha industri mikro dan kecil merupakan kelompok usaha yang paling banyak digeluti oleh pengusaha-pengusaha perempuan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11.1 Usaha Mikro dan Kecil 2018

No	Kecamatan	Jenis Usaha	Usaha Mikro		Jumlah
			L	P	L + P
1	Kamang Baru	30	3.277	3.267	6.544
2	Tanjung Gadang	11	354	472	826
3	Sijunjung	39	3.030	3.692	6.722
4	Lubuk Tarok	6	235	212	447
5	IV Nagari	11	2.076	2.258	4.334
6	Kupitan	9	740	859	1.599
7	Koto VII	26	1.460	1.668	3.128
8	Sumpur Kudus	26	2.261	1.962	4.223
Jumlah		158	13.433	14.390	27.823

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan

Dari tabel di atas diketahui bahwa usaha mikro dan kecil pada tahun 2018 sebanyak 27.823. Hal ini menggambarkan bahwa usaha mikro dan kecil di Kabupaten Sijunjung, pedagang usaha mikro dan kecil yang terbanyak adalah Kecamatan Sijunjung 6.722, kemudian Kecamatan Kamang Baru 6.544, Kecamatan IV Nagari 4.334, Kecamatan Sumpur Kudus, Kecamatan Koto VII, Kecamatan Kupitan 1.599, Kecamatan Tanjung Gadang 826, dan usaha mikro dan kecil yang paling sedikit Kecamatan Lubuk Tarok 447.

B. Keanggotaan Koperasi

Tabel 11.2 Keanggotaan Koperasi 2018

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		L + P
		L	P	
1.	Sijunjung	90	133	223
2.	Lubuk Tarok	63	76	139
3.	Kamang Baru	128	132	260
4.	Kupitan	21	81	102
5.	Tanjung Gadang	77	128	205
6.	Sumpur Kudus	127	200	327
7.	Koto VII	125	243	368
8.	IV Nagari	36	81	117

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM Kab.Sijunjung

Kenggotaan koperasi di Kabupaten Sijunjung dengan jumlah terbanyak yaitu kecamatan Koto VII sebesar 368 orang dengan anggota yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 125 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 243 orang. Hal ini juga menunjukkan besarnya keterlibatan perempuan sebagai anggota koperasi di Kabupaten Sijunjung

BAB XII

BIDANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Kiprah kaum perempuan dalam pembangunan sangat diperlukan. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Sijunjung masih sangat rendah, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

A. Polisi

Tabel 12.1Polisi Kabupaten Sijunjung

No	Jenis Kepangkatan	Jumlah Polisi		
		L	P	L + P
1.	Perwira Tinggi :	-	-	-
	a. Jenderal Polisi	-	-	-
	b. Komisaris Jenderal Polisi	-	-	-
	c. Inspektur Jenderal Polisi	-	-	-
	d. Brigadir Jenderal Polisi	-	-	-
2.	Perwira Menengah (Pamen) :	-	-	-
	a. Komisaris Besar Polisi	-	-	-
	b. Ajun Komisaris Besar Polisi	1	-	1
	c. Komisaris Polisi	4	-	4
3.	Perwira Pertama	-	-	-
	a. Ajun Komisaris Polisi	6	-	6
	b. Inspektur Satu Polisi	32	-	32
	c. Inspektur Dua PolisiI	12	-	12
4.	Bintara	226	17	243
Jumlah		281	17	298

Sumber : Kapolres Sijunjung

Berdasarkan tabel diatas jumlah polisi di Kabupaten Sijunjung di dominasi oleh jenis kelamin laki-laki hal tersebut menggambarkan bahwa masih rendah keterlibatan perempuan di bidang pengambil keputusan pada bidang kepolisian.

B. Jaksa

Tabel 12.2 Jaksa Kab.Sijunjung

No	Jenis Jabatan Jaksa	Jumlah Jaksa		
		L	P	L + P
1.	Fungsional	-	3	3
2.	Struktural	5	-	5
3.	Eselon 1	-	-	-
4.	Eselon II/a	-	-	-
5.	Eselon II/b	-	-	-
6.	Eselon III/a	-	-	-
7.	Eselon III/b	1	-	1
8.	Eselon IV	-	-	-
9.	Eselon V	-	-	-
Jumlah		6	3	9

Sumber : Kejaksaan Negeri Sijunjung

Berdasarkan tabel diatas jumlah jaksa di Kabupaten Sijunjung menurut jenis kelamin telah menunjukkan adanya keseimbangan jumlah antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut menggambarkan bahwa sudah adanya kesetaraan dan keberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan di kejaksaan negeri sijunjung.

C. Hakim

Tabel 12.3 Hakim Kab.Sijunjung

No	Jenis Jabatan Hakim	Jumlah Hakim		
		L	P	L + P
1.	Ketua Pengadilan Negeri	-	1	1
2.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri	-	-	-
3.	Hakim Pengadilan Negeri	2	-	2
Jumlah		2	1	3

Sumber : Kejaksaan Negeri Sijunjung

Berdasarkan tabel diatas jumlah menunjukkan bahwa tidak ada keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan oleh hakim di Kabupaten Sijunjung. Hal tersebut menggambarkan masih kurangnya keberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan oleh hakim di Kabupaten Sijunjung.

BAB XIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan data yang telah disajikan, maka dapat disimpulkan bahwa profil gender, kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Sijunjung memiliki perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan hampir berimbang. Jumlah penduduk laki-laki yaitu sebanyak 117.178 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 116.632 jiwa.

Namun, peran perempuan sebagai pengambil keputusan bisa dikatakan sangat minim. Hal ini terjadi karena kurangnya keberdayaan perempuan dalam pekerjaan seperti di bidang Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Oleh sebab itu, sangat diperlukan penganggaran yang responsif gender untuk meningkatkan kapasitas hidup perempuan dan perlindungan anak.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah agar program Pengarusutamaan Gender (PUG) agar lebih di perhatikan, karena PUG merupakan salah satu program pembangunan dari pusat yang harus diterapkan di setiap Kab/Kota di seluruh wilayah Indonesia
2. Pemerintah daerah diharapkan untuk mempertimbangkan isu gender dan perlindungan anak, proaktif untuk mendukung Program Pengarusutamaan Gender (PUG) serta penganggaran responsif gender guna untuk meningkatkan kapasitas hidup perempuan dan perlindungan anak melalui advokasi, sosialisasi dan pelatihan-pelatihan, serta pendidikan terhadap masyarakat, perempuan dan anak.